

Analisis Efektivitas Manajemen Keuangan pada BPKAD Provinsi Sumatera Utara

Djauky Ridho Amwa¹, Nurbaiti²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

djaukyr@gmail.com¹, nurbaiti@uinsu.ac.id²

ABSTRACT

Medan City is the largest economic contributor in North Sumatra. Based on data from the Central Statistics Agency (BPS), the city's gross regional domestic product (GRDP) at current prices (ADHB) is IDR 242.2 trillion in 2020. This value is equivalent to 30% of North Sumatra's total GRDP of IDR 811.3 trillion. This study uses a qualitative research approach. By way of terminology for Baydan and Taylor, a qualitative approach is a research method that creates descriptive information in the form of recorded words or utterances. The results of the study show that what was carried out at the Financial Institutions and Regional Assets in North Sumatra Province regarding Financial Performance of the Regional Expenditure Budget According to the data analysis that has been carried out, it can be concluded that the Regional Financial Independence Ratio is still below regional financial standards.

Keywords : *efficiency, effectiveness, bpkad.*

ABSTRAK

Kota Medan merupakan penyumbang perekonomian terbesar di Sumatera Utara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) kota tersebut sebesar Rp 242,2 triliun pada 2020. Nilai tersebut setara 30% dari total PDRB Sumatera Utara sebesar Rp 811,3 triliun. Penelitian ini memakai pendekatan riset kualitatif. Dengan cara terminologi bagi Baydan serta Taylor, pendekatan kualitatif ialah metode riset yang menciptakan informasi deskriptif berbentuk perkata tercatat ataupun perkataan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang dilakukan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah di Provinsi Sumatera Utara tentang Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Sesuai analisis data yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Rasio kemandirian Keuangan Daerah yang masih dibawah standar keuangan daerah.

Kata kunci : *efisiensi, efektivitas, bpkad.*

PENDAHULUAN

Pengelolaan anggaran pemerintah di era saat ini merujuk pada sistem Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK). Bagi Unit Finansial(2009: 11- 20), karakteristik penting PBK merupakan perhitungan yang disusun dengan memperhatikan ketergantungan antara pendanaan (input), serta hasil yang diharapkan (outcomes), alhasil bisa membagikan data mengenai daya guna serta kemampuan aktivitas.

Sumengge (2013:75) berkata kalau perhitungan penguasa terkait dengan cara determinasi jumlah peruntukan anggaran buat setiap program dan kegiatan dalam dasar moneter yang memakai anggaran kepunyaan warga.

Perhitungan khalayak ialah perlengkapan pemograman sekaligus perlengkapan pengaturan. Perhitungan selaku perlengkapan pemograman membawa alamat sasaran yang wajib dicapai oleh penguasa, sebaliknya perhitungan selaku perlengkapan pengaturan membawa alamat peruntukan pangkal anggaran khalayak yang disetujui legislatif buat dibelanjakan. Melalui informasi rekening berbelanja yang ada dalam perhitungan berbelanja badan atau badan penguasa, hendak diamati apakah perhitungan yang sudah terbuat bisa berfungsi selaku otak kepada penerapan aktivitas pemerintah.

Bagi Halim (2007:234- 241), pengukuran daya guna serta kemampuan finansial wilayah bisa dicoba dengan membagi Perbandingan Daya guna serta Rasio Kemampuan Finansial Wilayah. Perbandingan Daya guna ialah kemampuan rezim wilayah dalam mewujudkan PAD yang sudah direncanakan dibanding dengan sasaran yang diresmikan bersumber pada kemampuan riil wilayah. Sedangkan Perbandingan Kemampuan merupakan perbandingan yang melukiskan perbandingan realisasi pengeluaran (berbelanja) dengan realisasi pendapatan wilayah.

Independensi wilayah dimaksudkan buat membagikan kebebasan untuk daerah dalam mengatur dengan cara maksimum kemampuan wilayah, supaya bisa mensejahterkan warga. Harapannya, bersumber pada independensi wilayah bisa berhasil kemampuan, daya guna serta kejernihan cocok peraturan yang terdapat, paling utama berhubungan dengan pengurusan serta pertanggungjawaban finansial wilayah. Perihal ini berarti dalam independensi wilayah tercantum 3 tujuan penting, ialah: 1) menghasilkan kemampuan dan daya guna pengurusan sumberdaya wilayah; 2) tingkatkan mutu jasa biasa serta keselamatan warga; 3) memberdayakan serta menghasilkan ruang untuk warga buat turut dan dalam cara pembangunan (Mardiasmo, 2002).

Pertanggungjawaban finansial wilayah dituangkan dalam informasi finansial wilayah ialah salah satu wujud akuntabilitas serta kejernihan dari penguasa wilayah pada masyarakat. Pada masa pembaruan ini kejernihan dibutuhkan buat menjauhi asimetri informasi, alhasil warga memperoleh data yang serupa dengan rezim wilayah, serta bukan kebalikannya. Bersumber pada hasil pengecekan BPK, informasi finansial wilayah (LKPD) belum sepenuhnya qamenunjukkan hasil yang melegakan. Perihal ini teruji dari informasi finansial yang memperoleh pandangan alami tanpa ketentuan (WTP) cuma dekat 16% dari keseluruhan LKPD yang masuk (Pewarta Indonesia, 2013). Mutu informasi finansial wilayah meningkat lumayan penting di tahun 2017, ialah sebesar 70% yang memperoleh pandangan WTP (BPK: 2017).

Peraturan Penguasa Republik Indonesia Nomor. 58 tahun 2005 tentang pengurusan serta pertanggungjawaban Finansial Wilayah melaporkan pengelolaan

finansial wilayah wajib dicoba dengan cara teratur, dikala pada peraturan perundang-undangan yang legal, berdaya guna, efisien, tembus pandang serta bertanggungjawab dengan mencermati dasar kesamarataan kepantasan serta khasiat buat warga. Pengurusan finansial wilayah yang berdaya guna serta efisien wajib dicoba dengan cara maksimal, sebab kerap kali realisasi tidak cocok sasaran.

Bagi Robbins serta Mary (2009) kemampuan merupakan merujuk untuk memperoleh hasil output yang maksimum dari jumlah input yang sedikit. Karena administrator berhubungan dengan input yang sangat jarang, tercantum pangkal energi semacam orang, duit serta perlengkapan. Hingga mereka fokus dengan kemampuan pemakaian pangkal energi itu. Kemampuan kerap diucap selaku “melaksanakan perihal yang betul” ialah, tidak membuang-buang pangkal energi.

Kemampuan amat berarti sebab bisa mengirit ataupun mengurangi pemakaian pangkal energi didalam melaksanakan sesuatu kegiatan atau aktivitas, tidak hanya itu kemampuan pula bisa mengoptimalkan pemakaian seluruh pangkal daya yang terdapat alhasil tidak terdapat yang terbuang sia-sia.

Bagi Bastian (2013) efektifitas bisa dimaksud selaku keberhasilan dalam menggapai tujuan yang sudah diresmikan lebih dahulu. Tidak hanya itu efektifitas merupakan ikatan antara output serta tujuan dimana efektifitas diukur bersumber pada seberapa jauh tingkatan output ataupun keluaran kebijaksanaan buat menggapai tujuan yang sudah diresmikan. Bila kemampuan berpusat pada cara serta output hingga efektifitas berpusat pada outcome (hasil). Sesuatu program, aktivitas, ataupun badan ditaksir efisien bila output yang diperoleh bisa menggapai tujuan yang diharapkan ataupun dibilangspending wisely.

Efektifitas amat berarti buat diaplikasikan sebab bila melakukan sesuatu aktivitas ataupun kegiatan, wajib dilaksanakan dengan dengan semaksimal bisa jadi buat menggapai tujuan yang diharapkan. Efektifitas jadi tolok ukur atas sukses ataupun tidaknya sesuatu aksi yang dicoba, terus menjadi besar upaya yang diserahkan serta hasilnya cocok dengan yang diharapkan, hingga sesuatu kegiatan atau aktivitas itu sudah menggapai tutur efisien.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Pengukuran efisiensi dengan menggunakan pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA) dan efektivitas dengan menggunakan modifikasi kuesioner Bank Dunia.

Kota Medan merupakan penyumbang perekonomian terbesar di Sumatera Utara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) kota tersebut sebesar Rp 242,2 triliun pada 2020. Nilai tersebut setara 30% dari total PDRB Sumatera Utara sebesar Rp 811,3 triliun.

Perekonomian Kota Medan ditopang oleh sektor konstruksi dan industri pengolahan. PDRB sektor konstruksi di kota tersebut berkontribusi sebesar Rp 45,61 triliun atau 18,83%, sementara industri pengolahan berkontribusi sebesar Rp 34,19

triliun atau 14,12% dari total perekonomian. Medan juga mencatatkan sebagai kabupaten/kota dengan PDRB per kapita terbesar pada tahun lalu, yakni senilai Rp 105,53 juta. Kabupaten Batu Bara berada di urutan kedua dengan PDRB per kapita Rp 83,28 juta dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan di posisi ketiga dengan PDRB per kapita Rp 81,78 juta.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Pengukuran efisiensi dengan menggunakan pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA) dan efektivitas dengan menggunakan modifikasi kuesioner Bank Dunia.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam sesuatu sistem yang berintegrasi yang direalisasikan dalam perhitungan pemasukan serta belanja wilayah yang tiap tahun diresmikan dengan peraturan wilayah. Bagi Berhasil Binar (1999) finansial wilayah merupakan semua aturan, fitur kelembagaan serta kebijaksanaan perhitungan wilayah yang mencakup pendapatan serta berbelanja wilayah. Bagi Mamesah (1995) finansial wilayah merupakan semua hak serta peranan yang bisa ditaksir dengan duit, begitu pula segala suatu bagus berbentuk duit ataupun benda yang bisa dijadikan kekayaan wilayah selama belum dimiliki atau dipahami oleh negeri ataupun wilayah yang lebih besar, dan pihak lain cocok dengan determinasi peraturan yang legal.

Tujuan penting dari pengurusan finansial wilayah serta organisasi Penguasa Wilayah merupakan membagikan jasa yang prima untuk warga di wilayah yang ialah klient dari penguasa wilayah. Dalam perihal ini, seluruh bagian penguasa yang terdapat dengan cara utama difungsikan buat melayani dengan sebaik-baiknya warga yang berhubungan. Buat bisa berperan selaku public service hingga anggapan aparatur penguasa wilayah mengenai jasa kepada warga ialah sesuatu kunci dalam membagikan kejelasan arah, terus menjadi bagus anggapan aparatur penguasa hendak terus menjadi bagus pula penajaan rezim sedemikian itu pula sebaliknya.

Pengawasan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD)

Pengawasan pemerintah merupakan pengawasan dari serta kepada penguasa, kenapa penguasa yang berdaulat harus serta wajib diawasi. Perihal tersebut penguasa mengenakan duit orang, wajib menata orang dengan bagus serta betul, mengurus serta menata seluruh perkara orang dengan bagus serta betul. Fungsi menata diserahkan pada administrator yang berikutnya diawasi legislatif, sebaliknya guna menata diserahkan pada legislatif yang diawasi oleh orang lewat pengawasan pers, badan swadaya warga, serta bermacam grub penekan yang memilah mereka.

Sesungguhnya pengawasan dipecah jadi 2 bagian besar ialah pengawasan politik serta pengawasan ekonomi. Pengawasan merupakan salah satu guna dalam menejemen rezim buat menjamin supaya penerapan kegiatan penguasa berjalan dengan cocok standar yang sudah diresmikan dalam pemograman rezim, supaya warga dan masyarakat bangsa menggapai kondisi seimbang mampu dalam waktu yang telah ditetapkan bersama. Sebaliknya Pengawasan merupakan cara dalam memutuskan dimensi kemampuan serta pengambilan aksi yang bisa mensupport pendapatan hasil yang diharapkan cocok dengan kemampuan yang sudah diresmikan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai tipe riset deskriptif, yang maksudnya cerminan dengan cara analitis, aktual, serta cermat hal fakta- fakta, sifat- sifat dan ikatan antara kejadian yang diselidiki. Riset yang memakai tipe deskriptif merupakan riset yang dimaksudkan buat menggambarkan, melukiskan, ataupun menguraikan kondisi subjek yang diawasi apa terdapatnya mengenai bagaimana efektifitas manajemen keuangan di BPKAD Provinsi Sumatera Utara .

Dan penelitian ini memakai pendekatan riset kualitatif. Dengan cara terminologi bagi Baydan serta Taylor, pendekatan kualitatif ialah metode riset yang menciptakan informasi deskriptif berbentuk perkata tercatat ataupun perkataan. Periset memakai pendekatan kualitatif dengan tujuan menguak data- data yang di uraikan oleh pangkal informasi serta kontestan buat mengenali bagaimana efektifitas manajemen keuangan di BPKAD Provinsi Sumatera Utara .

Dalam metode pengumpulan informasi, periset memakai metode tanya jawab tidak tertata pada riset ini. Metode tanya jawab tidak tertata ialah metode yang bila terdapat balasan yang tidak cocok pertanyaan- pertanyaan yang sudah disiapkan hingga bisa mencuat persoalan lain. Tanya jawab ini dicoba buat memperjelas balasan dari seluruh kesimpulan permasalahan yang terdapat. Serta tanya jawab dicoba dengan cara langsung pada informan yang telah di pastikan. Periset melaksanakan waawancara ini dicoba buat mendapatkan informasi hal bagaimana efektifitas manajemen keuangan di BPKAD Provinsi Sumatera Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Efektivitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan program yang akan berdampak pada hasil sebuah program tersebut. Jika kontribusi hasil sebuah program lebih tinggi dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah maka semakin efektif kinerja suatu pemerintah daerah yang semakin baik. Kinerja Badan keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dikategorikan efektif jika rasio mencapai nilai lebih dari 100%. Semakin tinggi nilai rasio efektivitas maka semakin baik kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan wawancara dan observasi menunjukkan bahwa efektifitas pengolahan keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara menunjukkan hasil yang tidak efektif karena nilai yang diperoleh tergolong rendah yaitu kurang dari 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak efektif dalam merealisasikan pendapatan daerah yang sebenarnya dan telah direncanakan, dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan melalui potensi riil daerah. Hasil analisis efektifitas dapat menunjukkan seberapa besar realisasi dari pendapatan daerah dengan target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu. Melalui penargetan realisasi pendapatan daerah diharapkan dapat mendukung kinerja pemerintah daerah dalam mencapai target hasil penerimaan daerah yang tinggi.

Dan berdasarkan hasil penelitian mengenai efisiensi menunjukkan bahwa efisiensi keuangan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah di Provinsi Sumatera Utara dapat dikatakan efisien karena nilainya dibawah 100%. Hal tersebut terjadi karena pemerintah dapat meminimalisir jumlah belanja di daerahnya dan mampu menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja didaerahnya dengan baik. Hal tersebut dimiliki oleh daerah yang lebih besar pendapatannya dibandingkan belanja yang dilakukan oleh pemerintah. Melalui hasil analisis efisien dapat diketahui tingkat efisiensi belanja daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah. Melalui perhitungan rasio efisiensi dapat diketahui seberapa besar belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan daerah

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah di Provinsi Sumatera Utara tentang Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Sesuai analisis data yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Rasio kemandirian Keuangan Daerah yang masih dibawah standar keuangan daerah. Untuk Rasio efektifitas Keuangan Daerah tidak efektif keuangan daerah. dan untuk rasio efisiensi keuangan daerah kinerja pemerintah daerah berada dalam kategori efisien.

Berdasarkan Kinerja Pendapatan pemerintah daerah Provinsi Daerah dapat dinilai berada pada tingkat kemampuan yang kurang. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah diupayakan memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar untuk membiayai APBD nya. Semakin tinggi Rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah rasio kemandirian, semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina Oesi, 2013. *Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang*. Universitas Brawijaya Malang.
- Badruddin, Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Chairilful. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kepulauan Sangihe*. Manado: Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Fahmi. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan pada PT. PLN (persero) wilayah sulutenggo area Manado*: Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Halim. 2012. *Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Tahu Anggaran 2011-2013*. Sumatra Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Halim Abdul. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Salemba Empat
- Harahap, Sofyan Safri. 2013. *Analisa Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada